



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**



DISKOMINFOTIKSAN

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK & PERSANDIAN

KOTA DUMAI

GEDUNG LT.II MALL PELAYANAN PUBLIK

JL. H.R.SOEBRANTAS KEL.TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	9
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Sattistik Dan Persandian	20
2.3 Kinerja Pelayanan Komunikasi Informatika Sattistik Dan Persandian	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Sattistik Dan Persandian	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRSTEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	33
3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	45
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII PENUTUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bidang komunikasi Informatika Statistik dan Persandian di masa era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “elektronik government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Dumai juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Dumai yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

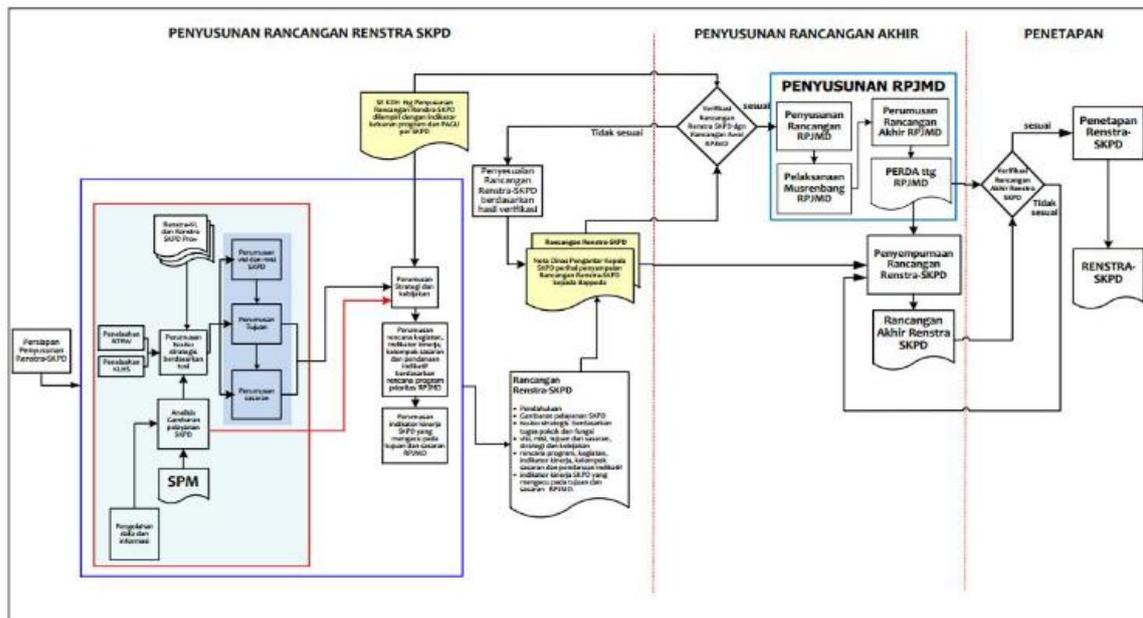
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD dan sasaran pembangunan nasional bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai tahun 2021-2026, telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021. Namun dengan berjalannya waktu, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, melakukan Perubahan untuk Penyempurnaan dokumen teknis tersebut. Sebagaimana dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, dengan terbitnya Kemendag tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai melakukan perubahan Rencana Srategis terhadap Kinerja, Indikator dan Satuan target Sub Kegiatan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Diskominfoitksan berkewajiban menyiapkan Renstra Perubahan yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra Perubahan tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen

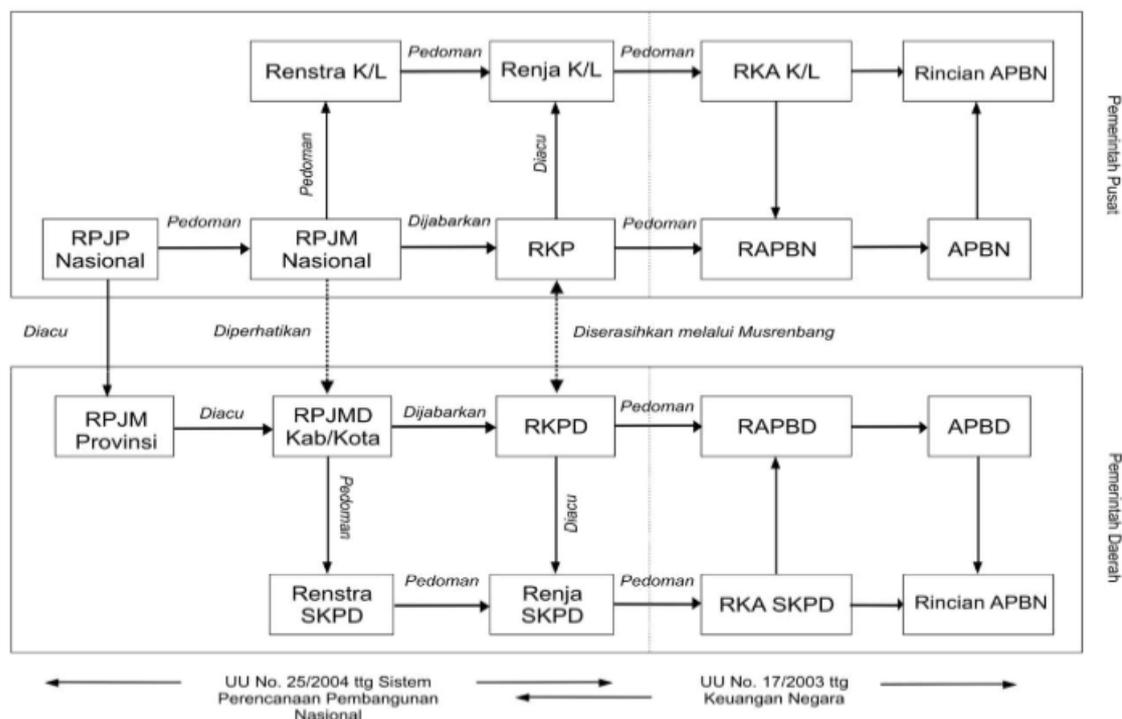
Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib di informasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Proses Penyusunan Rencana Strategis dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Selanjutnya keberadaan Rencana strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja setiap tahunnya yang akan menjadi dasar penetapan RKPD Kota Dumai.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Stategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (RPJMD 2021-2026).
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas - tugas sesuai dengan
4. Bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Informatika Statistik dan Persandian berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi

Informatika statistik dan persandian

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi

Informatika statistik dan persandian

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Komunikasi Informatika statistik persandian

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai, maka Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

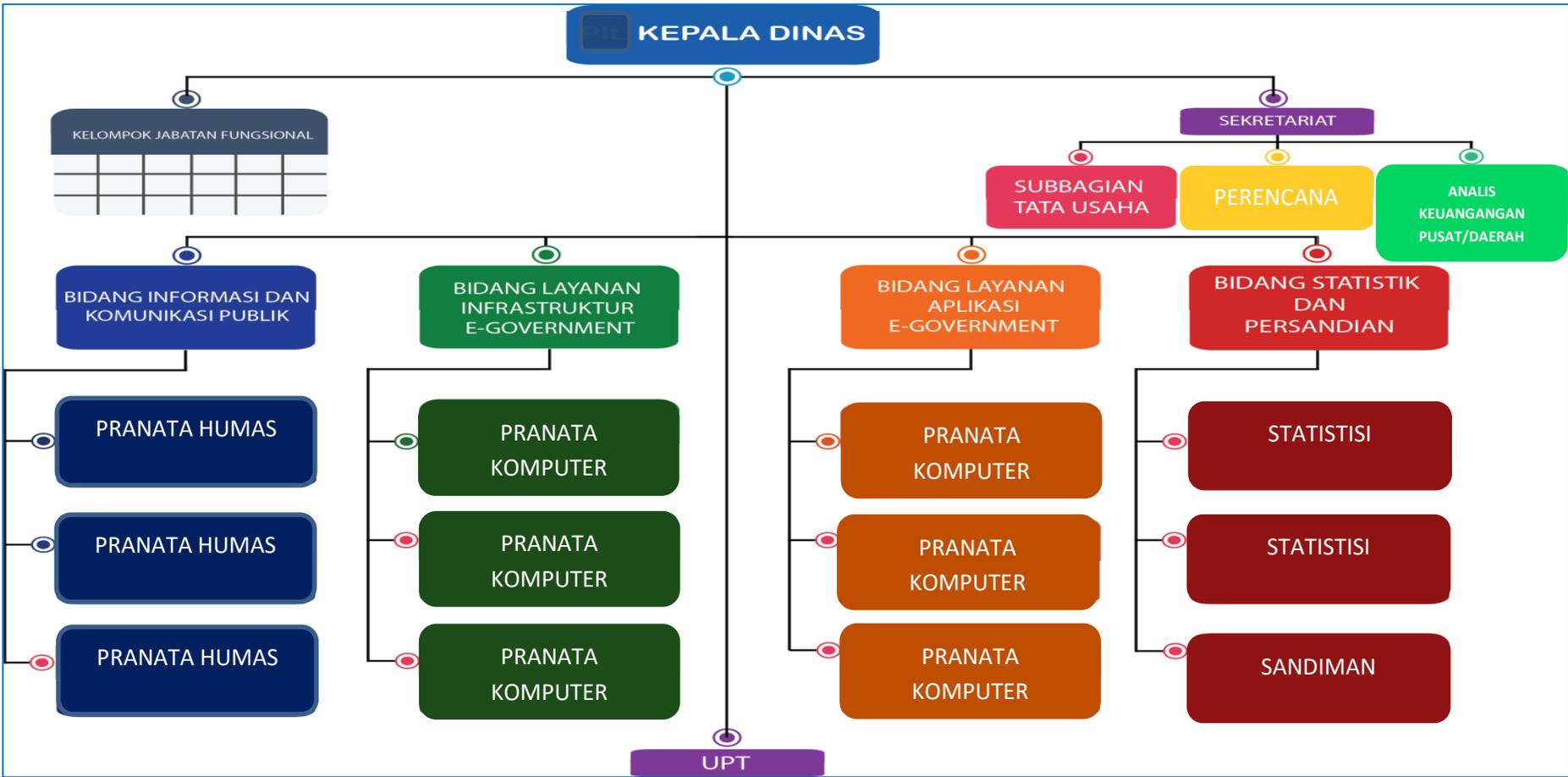
- a. Perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Perencana; dan
 3. Analis Keuangan Pusat/Daerah;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Pranata Humas;
 2. Pranata Humas; dan
 3. Pranata Humas;
- d. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, terdiri dari:
 1. Pranata Komputer;
 2. Pranata Komputer, dan;
 3. Pranata Komputer;
- e. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari:
 1. Pranata Komputer;
 2. Pranata Komputer; dan
 3. Pranata Komputer;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 1. Statistisi;
 2. Statistisi; dan
 3. Sandiman.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA DUMAI



2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas dan tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag Tu dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai;
- b. Pengoordinasian dan Penyusunan Perencana, Program dan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai;
- c. Pemberian Dukungan Administrasi yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggan, Kerjasama, Hubungan Masyarakat, Arsip dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai;
- d. Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Pengoordinasian dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi umum;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Penyiapan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Perencana;
- c. Analis Keuangan Pusat/Daerah

A. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Arsip dan Dokumentasi.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan dan Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman dan Petunjuk serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Arsip Dan Dokumentasi;
- b. Menyiapkan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan dan Pemeliharaan bahan pemberian dukungan Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Menyiapkan Administrasi Pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. Menyiapkan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan Administrasi Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kepegawaian, Arsip dan Dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan Penyelenggaraan urusan Surat Menyurat/Naskah Dinas dan Kearsipan;
- f. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- g. Dst

B. Perencana

Perencana mempunyai tugas melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Anggaran di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai.

Perencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan Pengumpulan bahan peraturan Perundang-undangan, Kebijakan teknis, Pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Menyiapkan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Informasi yang berhubungan dengan Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Menyiapkan Perumusan Pedoman dan Petunjuk teknis dalam Penyusunan Rencana Program, Evaluasi dan Pelaporan;

- d. Menyiapkan bahan Penyusunan Rencana/Program dan Kegiatan Jangka Panjang, Menengah, Pendek berupa Rencana Strategis Organisasi, serta bahan Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Program dan Pencapaian Akuntabilitas Kinerja;
- f. Menyiapkan bahan Koordinasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan Inventarisasi Permasalahan dan Petunjuk Pemecahan Masalah; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan Lingkup tugasnya.

C. Analis Keuangan Pusat/Daerah

Analisis Keuangan Pusat/Daerah mempunyai tugas melakukan Administrasi Keuangan, Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara serta Sarana Program.

Analisis Keuangan Pusat/Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan Pengumpulan bahan peraturan Perundang-undangan, Kebijakan teknis, Pedoman dan Petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Administrasi Keuangan, Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara serta sarana program;
- b. Menyiapkan bahan Perumusan Penyusunan Kebijakan dan Petunjuk teknis berkaitan dengan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang Milik/Kekayaan Negara serta sarana program;
- c. Menyiapkan bahan urusan Keuangan, Perbendaharaan, Akutansi, Verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Pengelolaan sarana;
- d. Dst.

2.1.3 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas yaitu Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Informasi dan Komunikasi publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi publik, Pemyediaan Konten lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi di daerah;
- b. Penyiapan bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi publik, Pemyediaan Konten lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi di daerah;
- c. Penyiapan bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penyelenggaraan di Bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi publik, Pemyediaan Konten lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Layanan Hubungan Media dan Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi di daerah;
- d. Penyiapan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;

2.1.4 Bidang Layanan Infrastruktur e-Government

Bidang Layanan Infrastruktur *e-Government* mempunyai tugas yaitu Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Infrastruktur dan Teknologi, Pengelolaan Data dan Interperabilitas, dan Interkoneksi dan Jaringan TIK.

Bidang Layanan Infrastruktur *e-Government* dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Layanan Infrastruktur *e-Government* dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data, dan Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan Kebijakan dibidang Layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data, dan Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi dibidang Layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data, dan Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Layanan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, Layanan Pengembangan Intranet dan Penggunaan Akses Internet, Layanan Manajemen Data, dan Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan;
- e. Penyiapan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;

2.1.5 Bidang Layanan Aplikasi e-Government

Bidang Layanan Aplikasi *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi *e-Government*, Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Tata Kelola *e-Government*.

Bidang Layanan Aplikasi *e-Government* dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Layanan Aplikasi *e-Government* dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah di Bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan

Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smartcity, Layanan nama Domain dan Subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah;

- b. Penyiapan bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smartcity, Layanan nama Domain dan Subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah;
- c. Penyiapan bahan pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smartcity, Layanan nama Domain dan Subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smartcity, Layanan nama Domain dan Subdomain bagi lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* di Pemerintah Daerah, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Daerah;
- e. Penyiapan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;

2.1.6 Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pendataan, Pengolahan dan Analisis data Statistik Sektoral, Penyajian data dan Informasi Statistik Sektoral dan Persandian.

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendataan, Pengolahan dan Analisis data Statistik Sektoral, Penyajian data dan Informasi Statistik Sektoral, Keamanan Informasi, tata kelola Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pengelolaan Informasi berklasifikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Penyiapan bahan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendataan, Pengolahan dan Analisis data Statistik Sektoral, Penyajian data dan Informasi Statistik Sektoral, Keamanan Informasi, tata kelola Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pengelolaan Informasi berklasifikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- c. Penyiapan bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di Bidang Pendataan, Pengolahan dan Analisis data Statistik Sektoral, Penyajian data dan Informasi Statistik Sektoral, Keamanan Informasi, tata kelola Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pengelolaan Informasi berklasifikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendataan, Pengolahan dan Analisis data Statistik Sektoral, Penyajian data dan Informasi Statistik Sektoral, Keamanan Informasi, tata kelola Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pengelolaan Informasi berklasifikasi di lingkup Pemerintah Daerah;
- e. Penyiapan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya;

2.1.7 Kelompok Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil dalam jenjang Fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta membantu Kepala Dinas sesuai Keahlian, Keterampilan dan Fungsional masing-masing. Dalam hal pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan dalam tim kerja untuk mendukung

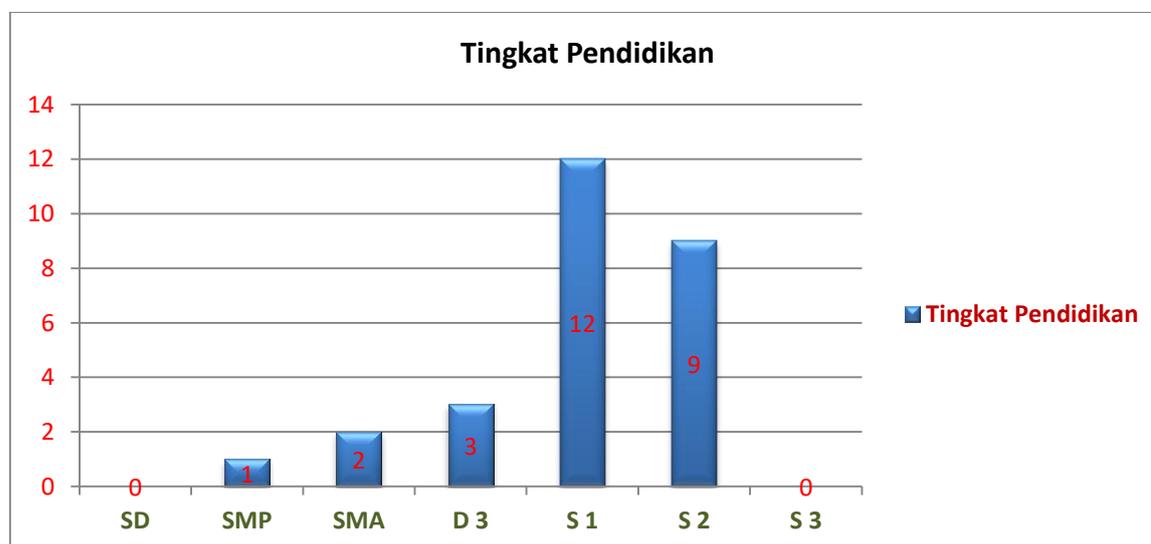
pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, Lintas unit organisasi, Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Instansi Pemerintah.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai Latar belakang Pendidikan dari berbagai macam keahlian dan disiplin ilmu. Terutama dalam mendukung terwujudnya pencapaian kinerja dari Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, juga dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana yang turut menunjang Keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, maka Penggolongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai memiliki pegawai sebanyak 27 orang PNS, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag dan Jabatan Fungsional.

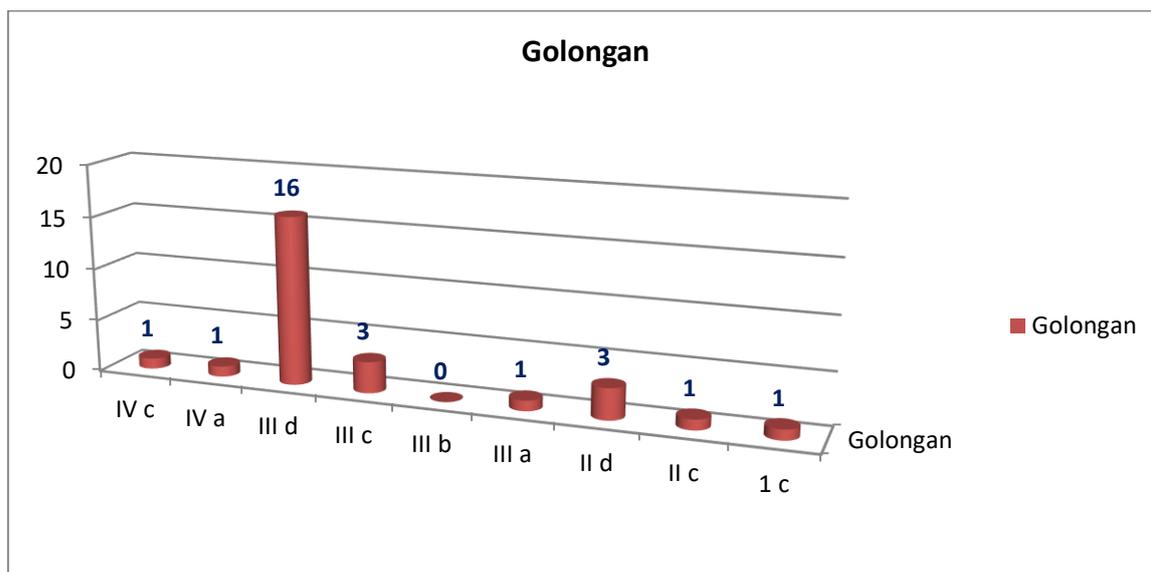
Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai, sebagai berikut :

Grafik 2.2.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



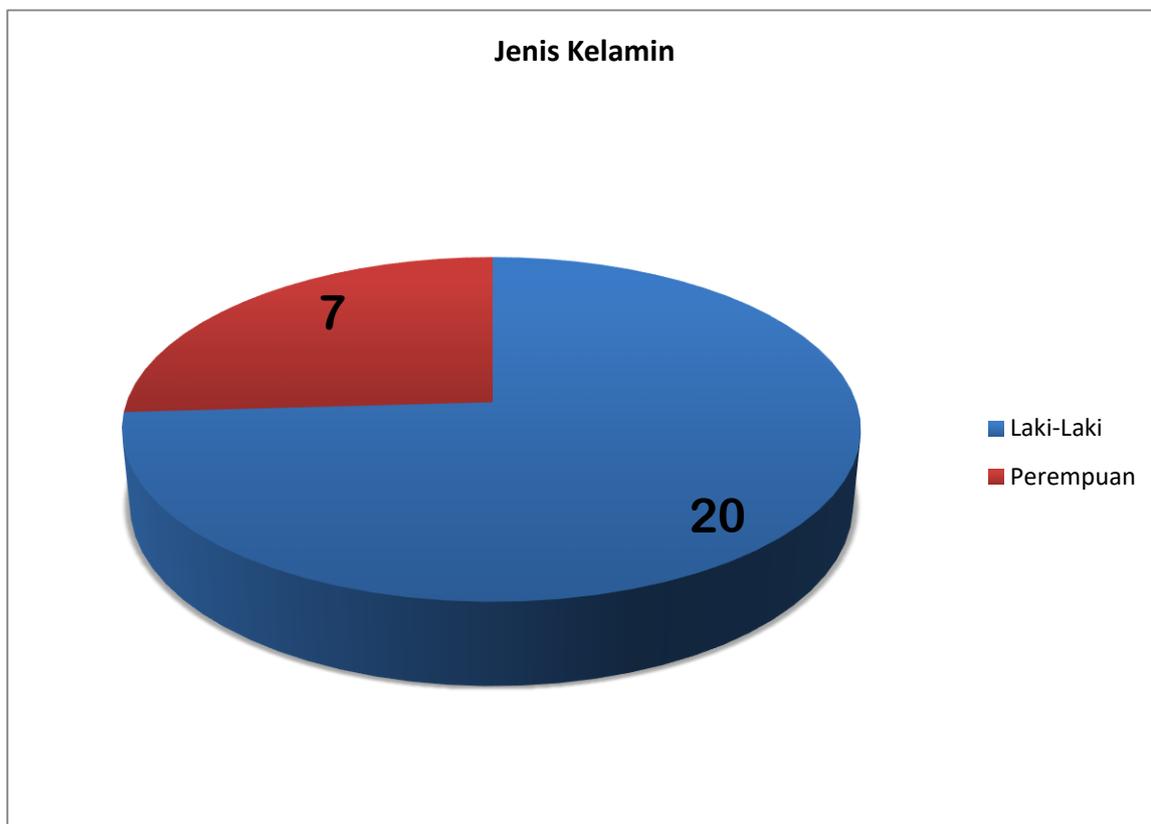
Berdasarkan golongan PNS Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai, sebagai berikut :

Grafik 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan



Berdasarkan jenis kelamin PNS Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai, sebagai berikut :

Grafik 2.2.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sarana dan prasarana berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Data Sarana dan Prasarana
Diskominfotiksan Kota Dumai

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (Unit/buah)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit
3.	Mesin Fotocopy	1 Unit
4.	Laptop	9 Unit
5.	Komputer	36 Unit
6.	Printer	32 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai 2021 – 2023 yang mengacu pada RPJMD Kota Dumai 2021 – 2023 dapat dilihat pada lampiran dokumen renstra ini.

Tabel 2.3.1
T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai

No	Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2016-2021	Satuan	Target tahun						Realisasi capaian tahun ke							Rasio capaian pada tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	-	-	-	2	2,5	2,81	-	-	-	2,54	2,25	2,56	2,63	-	-	-	127%	90,00%	91%
2	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi ke Jaringan Internet	OPD	-	-	-	24	32	36	-	-	-	36	36	36	111	-	-	-	150%	112,50%	100%
3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	-	-	-	5	7	7	-	-	-	7	7	7	13	-	-	-	140%	100%	100%
4	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	-	-	-	90	95	100	-	-	-	100-	100	100	85	-	-	-	111%	105%	100%

Jika dilihat Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2016-2021 pada poin 1 Kategori e-Government, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai menetapkan target indeks SPBE 2,81 dengan realisasi 2,56 sehingga pada tahun tersebut tidak mencapai target. Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB, ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Dumai, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaannya.

Terkait dengan indikator kinerja pada point kedua Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian terget ini di peroleh dari kegiatan yang menyediakan akses internet kepada OPD dengan dukungan tenaga ahli yang dimiliki. Namun untuk periode tahun renstra berikutnya Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai akan menaikkan target akses internet sampai ke wilayah yang belum terjangkau.

Indikator kelompok informasi masyarakat yang dibina dengan realisasi 7 kelompok informasi masyarakat yang telah dibina dengan capaian 100%. Pencapaian target kinerja tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan target ini didukung oleh kegiatan Penyebarluasan yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

Pengembangan dan pembinaan KIM memiliki peranan strategis dalam upaya menyongsong masyarakat informasi sebagai kehidupan masyarakat digital. Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai melakukan pembinaan terhadap KIM yang sudah terbentuk. Pembinaan yang dilakukan antara lain KIM diharapkan dapat mengetahui, memahami tugas dan perannya. Adapun tugas KIM sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lain;

4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain untuk wujudkan kebersamaan, kesatuan persatuan bangsa.

Target dari indikator Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebanyak 100% atau sebesar 100 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program kerjasama informasi dengan mass media.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah yang dilaksanakan selama tahun 2021. Adapun indikator untuk kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 jenis publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kerjasama media pada tahun 2021 ini terdiri dari 14 (empat belas) media cetak, 44 (empat puluh empat) media online dan 2 (dua) media televisi.

Tabel 2.3.2

T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai

No	Program	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kota	-	-	1.089.747.260	1.031.401.094	-	-	-	1.050.492.109	1.007.961.120	-	-	-	96.40	97.73	-	1.060.574.177	1.029.226.615
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	1.214.003.600	176.970.000	-	-	-	1.173.847.730	172.820.000	-	-	-	96.69	97.65	-	695.486.800	673.333.865
3	Peningkatan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	14.500.000	-	-	-	96.67	-	-	7.500.000	14.500.000

	n Kapa sitas Sum ber Daya Apar atur																	
4	Penin gkata n Peng emba ngan Siste m Pelap oran Capai an Kiner ja dan Keua ngan	-	-	69.029 .000	35.850 .000	-	-	-	66.610 .000	35.850 .000	-	-	-	96.50	100	-	52.439 .500	51.230 .000
5	Peng emba ngan Kom unik asi, Infor masi dan Medi a Mass a	-	-	3.172. 642.50 0	4.459. 772.10 0	-	-	-	3.142. 784.98 6	4.452. 242.12 8	-	-	-	99.06	99.8 3	-	3.816. 207.30 0	3.797. 513.55 7

6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	232.351.438	16.577.753	-	-	-	227.146.760	16.577.753	-	-	-	97.76	100	-	124.464.596	121.862.257
7	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	-	2.769.737.000	1.903.080.410	-	-	-	2.448.520.165	1.847.259.410	-	-	-	88.40	97.07	-	2.336.408.705	2.147.889.788
8	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman	-	-	92.366.000	42.146.417	-	-	-	91.732.962	40.646.417	-	-	-	99.31	96.44	-	67.256.209	66.189.690

	an Infor masi di Peme rinta h Daer ah																	
9	Peng emba ngan Data /Info rmasi /Stat istik Daer ah	-	-	147.56 6.000	106.90 2.030	-	-	-	147.38 8.424	100.40 2.030	-	-	-	99.88	93.9 2	-	127.23 4.015	123.89 5.227
1 0	Penin gkata n dan Peng emba ngan Peng elola an Keua ngan Daer ah	-	-	29.995 .000	20.595 .000	-	-	-	26.145 .000	20.220 .000	-	-	-	87.16	98.1 8	-	25.295 .000	23.182 .500
1 1	Progr am Peny ebarl	-	-	30.865 .000	-	-	-	-	30.825 .000	-	-	-	-	100	-	-	15.432 .500	15.412 .500

uasa n Infor masi Peme rinta h Daer ah																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai yang tersedia pada APBD Kota Dumai tidak terjadinya kesenjangan pelayanan dalam pemenuhan target indikator yang sudah ditetapkan pada rencana strategis.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Tantangan merupakan situasi yang menjadi ancaman bagi suatu Instansi dalam merealisasikan Kinerja Pelayanan, yang datang dari luar Instansi (eskternal) dan dapat mengancam elektabilitas Instansi di masa depan. Sedangkan peluang merupakan situasi (kondisi) yang datang dari luar Instansi (eksternal) dan memberikan dampak positif untuk perkembangan bagi Instansi di masa depan.

Dari hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan Instansi yang dilakukan, terangkum point-point yang menjadi Tantangan dan Peluang bagi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government ;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate ;
3. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik) ;
4. Jaminan keamanan sistem TIK ;
5. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi ;
6. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

Sementara peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya Pelayanan bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai dimasa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi ;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi ;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat ;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi) ;
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta ;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif ;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Pembangunan sarana Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian di Kota Dumai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sararan
pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Infrastruktur koneksi Jaringan Internet	Belum semua instansi perkantoran dan pusat layanan yang terkoneksi jaringan internet	Infrastruktur jaringan internet yang dibangun Internet Service Provider (ISP) yang belum sampai ke daerah tersebut.
		Peralatan sarana pendukung yang masih kurang	Server, radio wireless, akses point (mikrotik dan Modem), Tower triangle yang di miliki Diskominfotiksan yang masih kurang sehingga bisa menyebabkan terkendalanya dan lambatnya dalam hal pengoperasian TIK guna optimalnya pelaksanaan SPBE
		Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai	Penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai belum maksimal
		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Keahlian bidang TIK masim kurang
		Belum optimalnya Informasi dan	Informasi dan Komunikasi publik

			Komunikasi Publik	belum maksimal
2	Pelayanan Statistik	Bidang	Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik)	Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah
				Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
3	Pelayanan Persandian	Bidang	Masih perlunya peningkatan sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.	Kurangnya sarana dan prasana bidang persandian
				Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang persandian

Dalam mendukung kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Dumai khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan layanan Infrastruktur e-Government, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai memiliki sarana dan prasarana yang masih minim. Ini dibuktikan dengan beberapa instansi yang belum adanya penggunaan akses internet yang di distribusikan dari Diskominfotiksan.

Dari pantauan dilapangan, beberapa instansi yang belum terkoneksi akses internet tersebut dikarenakan faktor kondisi lokasi kantor yang begitu jauh (pinggiran kota) dan juga belum adanya infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Internet servis provider (ISP) di daerah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan pengelolaan yang bisa menjembatani antara ISP dan Kantor yang jauh tersebut agar bisa terkoneksi jaringan internet yaitu dengan menggunakan sarana Radio wireless dengan membangun Tower Internet (Triangle) serta dengan penambahan peralatan belanja modal server, router di Data Center.

Faktor Penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi antara lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan e-government dan masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

Faktor Pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi antara lain adalah adanya regulasi terkait penerapan SPBE dan dukungan dana yang memadai serta Kemajuan teknologi informasi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai mengacu pada visi misi dan program Walikota. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di

pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan misi pembangunan Kota Dumai, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Melalui Strategi Visi Misi yang saat ini sudah ada melalui penyelenggaraan Sistem Informasi yang mengarah pada suatu tujuan yaitu mewujudkan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Instrumen SPBE sehingga diharapkan layanan yang bukan sekedar Good Government namun diharapkan segera berevolusi menuju Kota Dumai Smart Government melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang telah di amanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.

Untuk melakukan penerapan *Enterprise Architecture (EA)* melalui penyelenggaraan SPBE Kota Dumai perlu dilakukan perancangan yang merupakan pendekatan dalam membangun *enterprise* berdasarkan dorongan kebutuhan data dan dorongan kebutuhan proses bisnis / layanan terintegrasi, perancangan ini terdiri dari 4 (empat) lapisan yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap ini Kota Dumai membutuhkan kerangka pengerjaan perancangan *Enterprise Architecture (EA)* yang berisikan cakupan atau area batasan, visi, misi, sumber daya, metodologi perencanaan serta membentuk tim perencana agar proyek perencanaan terarah, selesai tepat waktu dan memiliki tim berkualitas. Konsekuensinya pada tahap ini Kota Dumai sudah harus mendapatkan komitmen manajemen dan juga pembiayaan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Tinjauan kondisi kebutuhan pelaksanaan saat ini

a. Pemodelan proses bisnis

Tahap ini bertujuan untuk membangun suatu basis pengetahuan mengenai layanan dan sistem informasi yang digunakan Pemko Dumai saat ini. Tahap ini merupakan proses untuk mendefinisikan layanan pemerintahan, selanjutnya dibuat suatu matriks relasi antara fungsi pemerintahan dengan unit organisasi guna mengetahui tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi terhadap suatu fungsi layanan.

b. Sistem dan teknologi

Tahap ini tengah dilaksanakan pengidentifikasian dan Mendokumentasikan sistem aplikasi dan *platform* teknologi yang digunakan Pemko Dumai dalam mendukung fungsi bisnis saat ini. Karena *enterprise* yang telah berjalan pada umumnya telah memiliki sistem dan teknologi pada aplikasi-aplikasi sistem informasinya. Hasil dokumentasi disebut sebagai Katalog Sumber Daya Informasi (*Information Resource Catalog* atau *IRC*) atau disebut juga *Systems Inventory*. *IRC* tidak menjabarkan setiap sistem secara terperinci, melainkan hanya ringkasannya saja.

3. Tinjauan rencana masa depan

a. Arsitektur Data

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis data utama atau entitas data yang diperlukan bagi Pemko Dumai

guna mendukung fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada tahap pemodelan bisnis kemudian merelasikan entitas data tersebut dengan fungsi Layanan Pemerintahan Pemko Dumai.

b. Arsitektur Aplikasi

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis- jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi Layanan Pemerintahan Kota Dumai/Merelasikan aplikasi dengan fungsi Layanan Pemerintah. Arsitektur aplikasi bukan rancangan sistem tetapi merupakan pendefinisian aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi user atau pengguna layanan baik internal maupun eksternal

c. Arsitektur Teknologi

Tahap ini merupakan suatu pendekatan dalam menjelaskan struktur dan hubungan Metodologi Sistem Informasi saat ini serta di masa depan. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan *platform* teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengelola data dan mendukung fungsi Layanan Pemerintahan.

4. Penyusunan strategi pencapaian

Tahap ini bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan suatu rekomendasi untuk rencana pengimplementasian yang berdasarkan pada arsitektur yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah pada tahap rencana implementasi adalah:

- a. Menentukan urutan prioritas pengembangan aplikasi;
- b. Membuat estimasi-estimasi pelaksanaan implementasi;
- c. Membuat kesimpulan perencanaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembagayang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”** Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi Kemenkominfo

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 –2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;

2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian

Pada penggalan tahun 2019 - 2024 rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah : Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah

Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menciptakan tatakelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Riau.

Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang teknologi informasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparaturinya.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW.

3.4.2 Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan juga tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan KLHS.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Dumai (SPBE) ;
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam penyediaan akses internet;
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ;
4. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE

5. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.
6. Tata kelola keamanan informasi persandian di Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai tahun 2023-2026 adalah : **“Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai tahun 2023-2026 adalah : **“Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik”**.

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah		Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,85	3	3,1	3,3
		Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase Akses Jaringan Internet Yang Disediakan Pemerintah Daerah	(%)	57,14	63,03	67,23	68,91	71,43
			Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Disampaikan Melalui Media	(%)	80	85	-	-	-
			Persentase Cakupan	(%)	-	-	71	86	100

Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan (KIM)							
Persentase	(%)	75	75	80	80	80	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
Persentase	(%)	75	75	100	100	100	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							

Tabel 4.2

FORMULASI INDIKATOR (IKU SEBELUM PERUBAHAN)

IKU KOTA DUMAI :

No.	Indikator	Formulasi
1	Indeks Layanan SPBE	$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$

IKU OPD :

No.	Indikator	Formulasi
1	Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Menggunakan Akses Internet yang disediakan Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
2	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik dieselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$

No.	Indikator	Formulasi
3	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah Data Statistik yang Terkumpul}}{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral}} \times 100\%$
4	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Melaksanakan Sistem Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

Tabel 4.3

FORMULASI INDIKATOR (IKU PERUBAHAN)

IKU KOTA DUMAI :

No.	Indikator	Formulasi
1	Indeks Layanan SPBE	$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$

IKU OPD :

No.	Indikator	Formulasi
1	Akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah, LPMK}}{\text{Jumlah Kebutuhan Akses Jaringan Internet}} \times 100\%$
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kota Dumai}} \times 100\%$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Strategi 1.1 : Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Kebijakan 1.1 : Menigkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Kebijakan 1.2 : Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ✓ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat atau Esselon II
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pejabat atau Esselon II.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Relasi Media
- ✓ Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- ✓ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
- D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
- E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta Pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 7.1

T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Tahun 2022 — 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) serta sub kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Keterangan
							Tahun - 2022		Tahun - 2023		Tahun - 2024		Tahun - 2025		Tahun - 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian			100%	5.187.204.051	100%	6.042.820.688	100%	7.391.999.176	100%	7.391.999.176	100%	8.079.777.094	100%	34.093.800.185				
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		10 dokumen	53.416.000	10 dokumen	90.074.600	10 dokumen	157.500.000	9 dokumen	105.500.000	9 dokumen	118.500.000	47 dokumen	524.990.600				

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	20.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	3 dokumen	80.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	5.979.500	1 dokumen	11.400.900	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	48.379.500	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	4.129.500	1 dokumen	9.953.500	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	38.083.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	4.555.500	1 dokumen	10.575.500	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	41.131.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1 dokumen	4.207.400	1 dokumen	9.092.200	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	38.299.600	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2 Laporan	26.869.300	2 Laporan	44.527.500	2 Laporan	92.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	273.396.800	Diskominfo	Kota Dumai



**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1 Laporan	7.674.800	1 Laporan	4.525.000	1 Laporan	9.500.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	45.699.800	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen		3 dokumen	3.873.339.681	3 dokumen	4.307.831.611	3 dokumen	4.059.282.631	3 dokumen	4.131.947.094	3 dokumen	4.141.277.094	3 dokumen	20.513.678.111		
		2.16.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14 Orang / bulan	3.774.459.381	14 Orang / bulan	4.192.512.011	14 Orang / bulan	3.959.282.631	14 Orang / bulan	4.026.947.094	14 Orang / bulan	4.031.277.094	14 Orang / bulan	18.905.505.614	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1 Laporan	54.388.300	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1	227.324.600	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		2 Dokumen	44.492.000	2 Dokumen	60.319.600	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	254.811.600	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		3 Dokumen	26.768.100	3 Dokumen	28.200.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	60.000.000	15 Dokumen	224.968.100		

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	60.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	0	1 laporan	10.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	40.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1 laporan	26.768.100	1 laporan	28.200.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	194.968.100	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		1 Dokumen	151.578.000	1 Dokumen	73.037.917	1 Dokumen	600.000.000	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	370.000.000	5 Dokumen	1.474.615.917		
		2.16.01.2.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		70 Unit	-	70 Unit	-	70 Unit	0	70 Unit	-	70 Unit	20.000.000	70 Unit	80.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		66 Paket	-	-	-	80 Paket	200.000.000	80 Paket	80.000.000	80 Paket	100.000.000	80 Paket	300.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15 orang	98.578.000	25 orang	-	15 orang	200.000.000	25 orang	100.000.000	25 orang	125.000.000	80 orang	598.578.000	Diskominfo	Kota Dumai

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		15 orang	53.000.000	25 orang	73.037.917	15 orang	200.000.000	25 orang	100.000.000	25 orang	125.000.000	115 orang	643.423.200	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		1 Dokumen	351.975.399	1 Dokumen	366.933.250	1 Dokumen	620.000.000	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	860.000.000	5 Dokumen	2.948.908.649		
		2.16.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12 Paket	9.250.400	10 Paket	4.314.550	10 Paket	20.000.000	10 Paket	35.000.000	10 Paket	35.000.000	52 Paket	103.564.950	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket/bulan		12 Paket	66.729.400	10 Paket	62.448.900	10 Paket	70.000.000	10 Paket	100.000.000	10 Paket	200.000.000	52 Paket	599.178.300	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12 Paket	51.548.900	12 Paket	40.031.100	12 Paket	55.000.000	12 Paket	65.000.000	12 Paket	75.000.000	60 Paket	316.580.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket/bulan		12 Paket	22.437.200	12 Paket	8.497.700	12 Paket	25.000.000	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.000.000	60 Paket	155.934.900	Diskominfotiksan	Kota Dumai

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	202.009.499	1 Laporan	251.641.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	2.103.650.499	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		49 unit	97.110.300	54 unit	428.348.000	54 unit	860.216.545	54 unit	974.552.082	23 unit	1.190.000.000	272 unit	3.790.226.927		
		2.16.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 unit	-	1 unit	125.208.000	1 unit	0	1 unit	140.000.000	1 unit	140.000.000	1 unit	405.208.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		3 unit	-	3 unit	-	3 unit	450.000.000	3 unit	450.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	1.500.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		10 Unit	-	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	174.552.082	10 Unit	200.000.000	30 Unit	574.552.082	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		45 unit	97.110.300	51 unit	163.283.600	38 unit	160.216.545	37 unit	225.000.000	37 unit	225.000.000	208 unit	1.270.610.445	Diskominfo	Kota Dumai

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1 unit	-	1 unit	39.856.400	1 unit	150.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	125.000.000	5 unit	200.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		3 Laporan	501.066.571	3 Laporan	596.474.310	3 Laporan	665.000.000	3 Laporan	660.000.000	3 Laporan	660.000.000	15 Laporan	3.082.540.881		
		2.16.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1 Laporan	2.925.000	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	5 Laporan	27.925.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	185.341.571	1 Laporan	144.151.750	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	5 Laporan	1.108.601.750	Diskominfo	Kota Dumai
		2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	312.800.000	1 Laporan	452.322.560	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	550.000.000	5 Laporan	2.065.122.560	Diskominfo	Kota Dumai
				Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor																
				Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan																

		2.16.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3 unit	94.520.000	3 unit	96.225.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	790.745.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		55 unit	27.430.000	50 unit	38.896.000	52 unit	50.000.000	52 unit	65.000.000	52 unit	65.000.000	261 unit	246.326.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3 unit	10.000.000	3 unit	-	3 unit	100.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	15 unit	410.000.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai
Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah				Indeks layanan SPBE	Indeks		2,83 Indeks		2,85 Indeks		3 Indeks		3,1 Indeks		3,3 Indeks		3,3			

	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik			Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah	%		57,14 %		63,03 %		67,23 %		71,43 %		71,43 %		71,43 %			
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Internet Yang disediakan Pemerintah Daerah	%		57,14 %	3.430.660.119	63,03 %	4.283.897.170	67,23 %	7.418.871.348	68,91 %	13.688.727.520	71,43 %	17.884.876.320	71,43 %	46.707.032.477			
	2.16.03.02.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		77 Unit	2.375.127.800	86 Unit	3.650.295.500	100 Unit	5.579.922.300	-	0	-	0	263 Unit	11.605.345.600			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000			

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai

		2.16.03.02.01.0002	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain		1 Dokumen	9.002.000	1 Dokumen	99.395.500	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	258.397.500	Diskominfo	Kota Dumai	diganti dengan subkegiatan baru
		2.16.03.02.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	500.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	subkegiatan baru
		2.16.03.02.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		77 unit	2.366.125.800	86 Unit	3.550.900.000	100 Unit	5.429.922.300	0 Unit	0	0 Unit	0	263 Unit	11.346.948.100	Diskominfo	Kota Dumai	pin dah kegiatan

				Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama domain dan Sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dokumen		11 Dokumen	1.055.532.319	3 Dokumen	633.601.670	4 Dokumen	1.838.949.048	-	0	-	0	18 Dokumen	3.528.083.037	Diskominfotiksan	Kota Dumai	
		2.16.03.02.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	105 Perangkat Daerah	13.488.727.520	110 Perangkat Daerah	17.584.876.320	110 Perangkat Daerah	31.073.603.840	Diskominfotiksan	Kota Dumai	
		2.16.03.02.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	216.630.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	416.630.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	diganti dengan sub kegiatan baru

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.03.02.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen		7 dokumen	223.660.800	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 Dokumen	0	0	7 dokumen	223.660.800	Diskominfo	Kota Dumai	digital dengan sub kategori baru	
		2.16.03.02.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit		1 Unit	379.797.000	1 Unit	194.536.000	1 Unit	183.149.048	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	757.482.048	Diskominfo	Kota Dumai	digital dengan sub kategori baru
		2.16.03.02.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen		1 Dokumen	22.948.000	1 Dokumen	36.000.000	1 Dokumen	150.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	208.948.000	Diskominfo	Kota Dumai	digital dengan sub kategori baru
		2.16.03.02.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah		37 Perangkat Daerah	16.374.600	37 Perangkat Daerah	24.940.510	40 Perangkat Daerah	200.000.000	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	40 Perangkat Daerah	241.315.110	Diskominfo	Kota Dumai	digital dengan sub kategori baru

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.16.03.02.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit		1 Unit	16.011.000	5 Unit	226.840.000	5 Unit	450.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	11 Unit	692.851.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	digantikan dengan sub kegiatan baru
		2.16.03.02.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan		0 Layanan	0	0 Layanan	0	3 Layanan	250.000.000	0 Layanan	0	0 Layanan	0	3 Layanan	250.000.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	Kode rek, Indikator & output berubah th.2025 & 2026
		2.16.03.02.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen		1 Dokumen	169.630.919	1 Dokumen	76.312.660	1 Dokumen	248.900.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	494.843.579	Diskominfotiksan	Kota Dumai	digantikan dengan sub kegiatan baru
		2.16.03.02.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen		1 Dokumen	10.480.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.480.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	digantikan dengan sub kegiatan baru

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

	2.16.03.02.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Diskominfo	Kota Dumai	diganti dengan sub kegiatannya baru
	2.16.03.02.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen		0 dokumen	0	1 dokumen	74.972.500	1 dokumen	156.900.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	231.872.500	Diskominfo	Kota Dumai	diganti dengan sub kegiatannya baru
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	400.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Sub kegiatannya baru
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	800.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Sub kegiatannya baru
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	200.000.000	2 dokumen	350.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Sub kegiatannya baru

		2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi		0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	41 Aplikasi	650.000.000	50 Aplikasi	700.000.000	91 Aplikasi	1.350.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Subkegiatan baru
		2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi		0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	40 Aplikasi	125.000.000	40 Aplikasi	125.000.000	80 Aplikasi	250.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Subkegiatan baru
		2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Unit		0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	6 unit	325.000.000	6 unit	275.000.000	6 unit	600.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	Subkegiatan baru
		2.16.03.02.02.0024	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	105 Perangkat Daerah	11.418.727.520	110 Perangkat Daerah	15.514.876.320	215 Perangkat Daerah	26.933.603.840	Diskominfo	Kota Dumai	Kode rek, Indikator & Output Subkegiatan baru

		2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Program		0 Program	0	0 Program	0	0 Program	0	6 Program	220.000.000	6 Program	170.000.000	6 Program	390.000.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	subkegiatan baru
				Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	(%)		80%	2.430.160.983	85%	3.213.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																		
				Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	(%)		-	-	-	-	71%	4.062.000.000	86%	4.220.000.000	100%	4.072.500.000	100%	17.998.620.983	Diskominfotiksan	Kota Dumai	
		2.16.02.02.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola	%		80%	2.430.160.983	85%	3.213.960.000	-	0	-	0	-	0	90%	9.706.120.983	Diskominfotiksan	Kota Dumai	

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai

				Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotksan	Komunitas		0 Komunitas	0	0 Komunitas	0	13 Komunitas	4.062.000.000	13 Komunitas	4.220.000.000	13 Komunitas	4.072.500.000	13 Komunitas	8.292.500.000	Diskominfotksan	Kota Dumai
		2.16.02.02.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		4 Dokumen	307.036.000	4 Dokumen	726.636.874	4 Dokumen	400.000.000	0 Dokumen	0 dokumen	0	12 Dokumen	1.433.672.874	Diskominfotksan	Kota Dumai	Sub Kegiatan Pengelolaan & Pengelolaan Media Berbagung
		2.16.02.02.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		2 Dokumen	414.338.710	2 Dokumen	127.421.200	2 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0 dokumen	0	6 Dokumen	741.759.910	Diskominfotksan	Kota Dumai	Kode rek, Indikator & Output Sub kegiatan digital baru
diganti		2.16.02.02.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		2 Dokumen	50.713.710	1 Dokumen	36.410.000	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	187.123.710	Diskominfotksan	Kota Dumai	

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

diganti		2.16.02.02.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan		4 Layanan	1.415.729.428	4 Layanan	1.978.691.926	3 Layanan	2.530.000.000	0 Layanan	0	0 Layanan	0	11 Layanan	5.924.421.354	Diskominfotiksan	Kota Dumai	diganti sub kegiatan baru
diganti		2.16.02.02.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen		7 Dokumen	46.859.900	7 Dokumen	22.400.000	9 Dokumen	277.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	23 Dokumen	346.259.900	Diskominfotiksan	Kota Dumai	Kode rek. Indikator & Output Sub kegiatan diganti baru
		2.16.02.02.01.0012	Penyelenggara Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen		6 Dokumen	120.632.423	6 Dokumen	62.450.000	6 Dokumen	185.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	18 Dokumen	368.082.423	Diskominfotiksan	Kota Dumai	diganti sub kegiatan baru
untuk tahun 2025 - 2026 ditiadakan, pagu indikatif di pindahkan ke sub kegiatan desiminasi informasi		2.16.02.02.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit		2 unit	74.850.812	15 unit	259.950.000	15 unit	370.000.000	0 unit	0	0 unit	0	32 unit	704.800.812	Diskominfotiksan	Kota Dumai	diganti/gabung dengan sub kegiatan baru

	2.16.02.02.01.0014	Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfotksan, 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.100.000.000	1 Laporan	2.000.000.000	2 Laporan	4.100.000.000	Diskominfotksan	Kota Dumai	baru
	2.16.02.02.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotksan	Komunitas		0 Komunitas	0	0 Komunitas	0	0 Komunitas	0	13 Komunitas	260.000.000	13 Komunitas	210.000.000	13 Komunitas	470.000.000	Diskominfotksan	Kota Dumai	baru
	2.16.02.02.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		0 Permohonan	0	0 Permohonan	0	0 Permohonan	0	10 Permohonan	250.000.000	10 Permohonan	250.000.000	20 Permohonan	500.000.000	Diskominfotksan	Kota Dumai	baru
	2.16.02.02.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase		0%	0	0%	0	0%	0	100%	285.000.000	100%	305.000.000	100%	590.000.000	Diskominfotksan	Kota Dumai	baru

		2.16.02.02.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media		0 Media	0	0 Media	0	0 Media	0	2 Media	1.175.000.000	2 Media	1.157.500.000	2 Media	2.332.500.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.16.02.02.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang		0 orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	150.000.000	15 Orang	150.000.000	30 Orang	300.000.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai baru
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	(%)		75%	130.483.500	75%	52.020.000	80%	600.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.380.000	80%	2.859.183.500	Diskominfotiksan	Kota Dumai
		2.20.02.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen		1 Dokumen	130.483.500	1 Dokumen	52.020.000	1 Dokumen	600.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	782.503.500	Diskominfotiksan	Kota Dumai	

				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.008.300.000	1 Dokumen	1.068.380.000	1 Dokumen	2.076.680.000	Diskominfo	Kota Dumai	
		2.20.02.02.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen		1 Dokumen	75.415.000	1 Dokumen	52.020.000	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	327.435.000	Diskominfo	Kota Dumai	Diganti sub kegiata n
		2.20.02.02.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang		0 orang	0	0 orang	0	50 orang	200.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	50 orang	200.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	diganti sub kegiata n baru

		2.20.02.02.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen		1 Dokumen	55.068.500	Dokumen	0	1 Dokumen	200.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 Dokumen	255.068.500	Diskominfotiksan	Kota Dumai	digitalisasi subkegiatan baru
		2.20.02.02.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang		0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Diskominfotiksan	Kota Dumai	Kodek, Indikator & Output Subkegiatan digitalisasi baru
		2.20.02.02.01.0006	Penyelenggaraan Otonisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen		0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	Diskominfotiksan	Kota Dumai	digitalisasi subkegiatan baru

		2.20.02.2.01.007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	90 Orang	200.000.000	90 Orang	200.000.000	180 orang	400.000.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	baru
		2.20.02.2.01.008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	0%	0	0%	0	0%	0	100%	112.500.000	100%	155.342.500	100%	267.842.500	Diskominfotiksan	Kota Dumai	baru
		2.20.02.2.01.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	0%	0	0%	0	0%	0	100%	245.000.000	100%	277.010.000	100%	522.010.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	baru
		2.20.02.2.01.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	282.900.000	1 dokumen	290.685.000	2 Dokumen	573.585.000	Diskominfotiksan	Kota Dumai	baru
		2.20.02.2.01.011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	167.900.000	1 dokumen	145.342.500	2 Dokumen	313.242.500	Diskominfotiksan	Kota Dumai	baru

		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggara n persandian untuk pengamanan informasi	%		75%	136.376.710	75%	162.242.500	100%	500.000.000	100%	682.000.000	100%	777.000.000	100%	2.257.619.210			
		2.21.02.02.01	Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi	Perangkat Daerah		37 Peran gkat Daera h	136.376.710	37 Peran gkat Daera h	162.242.500	40 Peran gkat Daera h	500.000.000	40 Peran gkat Daera h	682.000.000	40 Peran gkat Daera h	777.000.000	40 Peran gkat Daera h	2.257.619.210			
		2.21.02.02.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		1 Lapor an	60.943.210	1 Lapor an	73.782.500	1 Lapor an	250.000.000	1 Lapor an	250.000.000	1 Lapor an	275.000.000	1 Lapor an	795.832.210	Diskomi nfotiksan	Kot a Du mai	
		2.21.02.02.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah		37 Peran gkat Daera h	75.433.500	37 Peran gkat Daera h	88.460.000	40 Peran gkat Daera h	250.000.000	40 Peran gkat Daera h	250.000.000	40 Peran gkat Daera h	300.000.000	40 Peran gkat Daera h	850.000.000	Diskomi nfotiksan	Kot a Du mai	

**Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kota Dumai**

		2.21.02.02.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		0 Laporan -	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	132.000.000	3 Laporan	152.000.000	3 Laporan	284.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		2.21.02.02.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen		0 dokumen -	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
TOTAL								11.314.885.363		13.754.940.358		19.972.870.524		26.991.026.696		31.882.533.414		103.916.256.355		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel VII.1

T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun - 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Persentase jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	-	57,14	63,03	67,23	68,91	71,43	71,43
2	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	-	85	88	0	0	0	0
	Persentase Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	-	71	86	100	100
3	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	75	75	80	80	80	80

4	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	-	75	75	100	100	100	100
----------	--	---	----	----	-----	-----	-----	-----

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra Perubahan ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu: ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026.

Dumai, Januari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA DUMAI
Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199101 1 001